STUDI KUANTITATIF PENGARUH KEMISKINAN, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, DAN PEKERJA SEKTOR INFORMAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019-2024

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana

ANA ESTARTI
NIM. B1013191041

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2026

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama	:	Ana Estarti
NIM	:	B1013191041
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	:	Studi Kuantitatif Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pekerja Sektor Informal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat Tahun 2019-2024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 02 September 2026



Ana Estarti
NIM. B1013191041

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama	:	Ana Estarti
NIM	:	B1013191041
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	:	Studi Kuantitatif Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pekerja Sektor Informal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat Tahun 2019-2024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 02 September 2026



Ana Estarti
NIM. B1013191041

LEMBAR YURIDIS

STUDI KUANTITATIF PENGARUH KEMISKINAN, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, DAN PEKERJA SEKTOR INFORMAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 - 20224

Penanggung Jawab Yuridis

Ana Estarti
NIM. B1013191041

Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 24 Juni 2026

Majelis Penguji

No	Majelis Penguji	Nama/ NIP	Tgl/ Bln/ Thn	Tanda Tangan
1	Pembimbing	Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si. NIP. 196205251987031002	01-09-2026	
2	Ketua Penguji	Yanto, S.E., M.Sc NIP.197706152003121004	31-08-2026	
3	Anggota Penguji	Romi suradi, S.E.I., M.E. NIP.198610022019031004	31-08-2026	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 09 SEP 2026
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP. 197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya haturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir yang berjudul "Studi Kuantitatif Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pekerja Sektor Informal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat Tahun 2019-2024" dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan ini merupakan syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak yang telah membantu serta memberikan saran masukan yang berharga. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Hj. Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Metasari Kartika, S.E., M.E., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak Yanto, S.E., M.Sc., selaku Koordinator Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak. Sekaligus sebagai Dosen Penguji (Ketua Penguji) yang telah memberikan arahan, nasehat di dalam penulisan Tugas Akhir.
6. Bapak Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah meluangkan waktu dengan sabar dan bijaksana dalam membimbing serta memberikan arahan, nasehat dan semangat penulis sampai terselesaikannya Tugas Akhir ini.

7. Bapak Romi Suradi, S.E.I., M.E., sebagai Dosen Penguji (Anggota Penguji) yang telah memberikan arahan, nasehat di dalam penulisan Tugas Akhir.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmunya kepada saya.
9. Seluruh Staff Akademik, Tata Usaha, Perpustakaan, serta Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
10. Keluarga saya tercinta, Ayah, Ibu, Abang dan Adik-Adik saya, atas jasa dan kasih sayang yang begitu besar. Dengan penuh kerendahan hati, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah, Ibu, Abang dan Adik-Adik tercinta. Terima kasih atas doa yang tiada henti dipanjatkan, kasih sayang yang tulus, serta dukungan baik secara moral maupun material yang selalu mengiringi setiap langkah saya. Pengorbanan, kesabaran, dan keikhlasan Ayah, Ibu, Abang dan Adik-Adik menjadi sumber kekuatan terbesar bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini, tiada kata yang mampu menggambarkan betapa besar jasa dan cinta kasih yang telah diberikan, namun saya berdoa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan hidup kepada Ayah, Ibu, Abang dan Adik-Adik. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi kebanggaan dan wujud kecil dari balas budi atas segala pengorbanan yang telah diberikan.
11. Terima kasih yang mendalam kepada sahabat seperjuangan saya selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, yaitu Nesa Monica, Wiwin Julianti, Siti Jubaidah, Iin Khoirunnisa, Thasya Aurelia Ariani, Syarifah Masyitah Humaira Alaydrus, Hany Rahma Putri, yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir serta sedia menjadi sahabat penulis dari masa perkuliahan hingga saat ini. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai keluarga yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, serta tawa di setiap perjalanan yang penuh tantangan ini, kebersamaan kita dalam belajar, berdiskusi, saling menguatkan, hingga berbagi keluh kesah menjadi bagian penting yang tidak ternilai dalam proses penyusunan skripsi ini. Tanpa kebersamaan dan dukungan kalian, perjalanan ini tentu tidak akan seindah

sekarang. Semoga pertemanan ini tetap terjalin erat, dan segala perjuangan yang telah kita lalui bersama menjadi bekal berharga untuk melangkah menuju masa depan yang lebih indah.

12. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada sahabat saya Dewi, Merry Andani , Julianti Pramita yang telah memberi kekuatan dalam menjalani masa-masa perkuliahan. Terima kasih atas setiap dukungan, doa, kebersamaan, serta semangat yang kalian berikan. Keceriaan, candaan, dan kebersamaan kita di menjadi bagian penting yang meringankan langkah saya ketika menghadapi berbagai tantangan. Tanpa kebersamaan itu, perjalanan ini tidak akan seindah dan sekuat ini.

Segala upaya dan kemampuan yang maksimal telah saya berikan dalam penulisan Tugas Akhir ini guna sebagai penambahan, pengembangan wawasan, dan studi. Namun demikian, saya menyadari bahwa Tugas Akhir ini belum sempurna. Mengingat keterbatasan pengetahuan yang penulis peroleh sampai saat ini, oleh karena itu saya mengharapkan saran dan kritis yang bersifat membangun guna tercapainya kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhir kata, saya berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Pontianak, 02 September 2026

Ana Estarti
NIM. B1013191041

A QUANTITATIVE STUDY ON THE IMPACT OF POVERTY, OPEN UNEMPLOYMENT RATES, AND INFORMAL SECTOR WORKERS ON THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN WEST KALIMANTAN (2019–2024)

Ana Estarti
Tanjungpura University, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the effects of poverty, the open unemployment rate (OUR), and workers in the informal sector on the Human Development Index (HDI) in West Kalimantan Province for the period 2019–2024. The research method employs a quantitative approach using panel data from 14 regencies/cities obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The analysis was conducted using panel data regression via the EViews 26 software, with the best model selected using the Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier tests. The results indicate that poverty has a negative and significant effect on the IPM with a coefficient of -1.840240. The open unemployment rate has a positive but insignificant effect on the HDI. Meanwhile, workers in the informal sector have a positive and significant effect on the HDI with a coefficient of 0.088018. Simultaneously, all three variables have a significant effect on the HDI with a coefficient of determination (R^2) of 98.47%. This study is expected to serve as a basis for the government's consideration in improving the quality of human development in West Kalimantan.

Keywords: Human Development Index (HDI), Poverty, Open Unemployment Rate, Informal Sector Workers, West Kalimantan.

STUDI KUANTITATIF PENGARUH KEMISKINAN, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, DAN PEKERJA SEKTOR INFORMAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019-2024

Ana Estarti
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan pekerja sektor informal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat periode 2019–2024. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari 14 kabupaten/kota yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel melalui aplikasi EViews 26 dengan pemilihan model terbaik menggunakan uji Chow, Hausman, dan *Lagrange Multiplier*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM dengan koefisien sebesar -1,840240. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM. Sementara itu, pekerja sektor informal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan koefisien sebesar 0,088018. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 98,47%. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Kalimantan Barat.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pekerja Sektor Informal, Kalimantan Barat.

STUDI KUANTITATIF PENGARUH KEMISKINAN, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, DAN PEKERJA SEKTOR INFORMAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019-2024

Oleh: Ana Estarti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

RINGKASAN

1. LATAR BELAKANG

Kemajuan ekonomi adalah salah satu elemen utama dari pertumbuhan manusia. Proses pertumbuhan ekonomi itu sendiri mencakup sumber daya manusia, yang merupakan komponen produksi seperti tenaga kerja yang mungkin mempengaruhi terjadinya pembangunan ekonomi. Pembangunan struktur dan layanan yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi serta kemajuan berkelanjutan sumber daya manusia, pengetahuan, dan teknologi adalah semua inisiatif penting yang diperlukan untuk mendorong kemajuan ekonomi. Karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menjadikan manusia sebagai salah satu tujuannya, pembangunan ekonomi adalah syarat yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi (Hasibuan et al., 2023).

Tujuan dari pembangunan adalah untuk memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan manusia, yang diukur dengan standar hidup, saat ini digunakan untuk mengevaluasi kemajuan ekonomi. Alih-alih melihat orang sebagai sarana untuk mencapai tujuan, pembangunan manusia melihat mereka sebagai tujuan utama. Meskipun banyak ukuran pembangunan manusia telah dirancang, tidak semuanya cocok digunakan sebagai standar untuk membandingkan negara atau daerah. Akibatnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran luas kemajuan manusia (BPS, 2019).

Sumber daya paling berharga suatu negara adalah rakyatnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan orang untuk hidup panjang, sehat, dan sejahtera. Sebuah filosofi pembangunan yang dikenal sebagai "pembangunan manusia" memandang individu sebagai pusat aktivitas ekonomi. Menguasai sumber daya manusia adalah tujuan utama dari pembangunan untuk menyediakan uang bagi standar hidup yang layak yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan manusia adalah tujuan utama dari semua kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu statistik yang

digunakan untuk menilai kemajuan manusia, menurut Arafat dan Rindayati (2018).

2. PERMASALAHAN

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam. Struktur perekonomian dan ketenagakerjaan di provinsi ini tidak hanya ditopang oleh aktivitas perkotaan, tetapi juga oleh sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, konstruksi, pertambangan, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas pembangunan manusia antardaerah di Kalimantan Barat masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, peningkatan IPM tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kemampuan penduduk memperoleh pendapatan, kesempatan kerja, dan pekerjaan yang mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang memadai.

3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait hubungan antara jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan jumlah pekerja sektor informal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat periode 2019–2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen, yaitu kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan pekerja sektor informal, terhadap variabel dependen berupa IPM, baik secara parsial maupun simultan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi yang memengaruhi kualitas pembangunan manusia di Kalimantan Barat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan temuan melalui analisis statistik (Jaya, 2020). Data yang digunakan berupa data panel, yaitu gabungan data runtut waktu (time series) dan data antarwilayah (Matondang & Nasution, 2021), sehingga penelitian ini berbentuk quasi experimental dengan desain time series (Muhyi, 2018). Lokasi penelitian berada di Kalimantan Barat dengan satu variabel dependen, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta tiga variabel independen, yaitu jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan pekerja

informal. Objek penelitian mencakup 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat selama periode 2019–2024.

Metodologi penelitian dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan strategi positivis yang digunakan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data melalui analisis statistik dan kuantitatif, serta menguji hipotesis yang telah dibuat. Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data *cross section* dan *time series*. Data *cross section* dalam penelitian ini berasal dari lima provinsi di Provinsi Pulau Kalimantan, sedangkan data *time series* mencakup rentang tujuh tahun, dari 2018 hingga 2024. Dengan demikian, dalam penelitian ini, 35 titik data digunakan sebagai observasi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda serta pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* Eviews 10. Taraf signifikansi yang digunakan untuk menguji data penelitian ini adalah sebesar 5% atau 0,05. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran terbuka, dan jumlah pekerja sektor informal.

5. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda dengan model terbaiknya adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan uji asumsi klasik diperoleh hasil bahwa data yang terdapat di dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas dan heterokedastisitas. Secara parsial variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), variabel TPT berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM, dan variabel pekerja sektor informal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Secara simultan, variabel kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan pekerja sektor informal berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan nilai koefisien determinasi sebesar 98,47%

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan pekerja sektor informal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019–2024, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Variabel kemiskinan memiliki koefisien sebesar -1,840240 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 (< 0,05), sehingga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 1% akan menurunkan IPM sebesar 1,84 poin. Dengan demikian, kemiskinan merupakan faktor penting yang secara langsung memengaruhi tingkat pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat. (2) Variabel tingkat

pengangguran terbuka (TPT) memiliki koefisien sebesar 0,014126 dengan nilai probabilitas sebesar 0,8540 (> 0,05), sehingga berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM. Artinya, perubahan tingkat pengangguran terbuka tidak memberikan pengaruh yang berarti secara statistik terhadap IPM. Dengan demikian, variabel TPT tidak terbukti sebagai faktor yang menentukan tingkat pembangunan manusia dalam penelitian ini. (3) Variabel pekerja sektor informal memiliki koefisien sebesar 0,088018 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0045 (< 0,05), sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini berarti setiap kenaikan 1% pekerja sektor informal akan meningkatkan IPM sebesar 0,088 poin. Dengan demikian, sektor informal memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (4) Secara simultan, variabel kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan pekerja sektor informal berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas uji F sebesar 0,000000 (< 0,05) dengan nilai F hitung sebesar 270,0606. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,984731 menunjukkan bahwa sebesar 98,47% variasi IPM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut dalam model, sedangkan sisanya sebesar 1,53% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Tingginya nilai R^2 ini dipengaruhi oleh penggunaan model Fixed Effect yang mampu menangkap perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Bagi pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja guna mengurangi fenomena pengangguran terdidik yang masih cukup tinggi. Selain itu, pemerintah perlu mendorong penciptaan lapangan kerja formal agar tenaga kerja dapat terserap secara optimal sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Di sisi lain, dukungan terhadap sektor informal juga perlu ditingkatkan melalui pemberian pelatihan kewirausahaan, kemudahan akses permodalan, serta legalisasi usaha kecil, sehingga sektor ini dapat berkembang lebih produktif dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. (2) Bagi masyarakat, diharapkan dapat terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi kerja agar mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat memanfaatkan peluang usaha di sektor informal secara lebih produktif sebagai alternatif sumber pendapatan. Partisipasi aktif dalam berbagai program pelatihan yang disediakan oleh pemerintah juga menjadi penting guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung peningkatan taraf hidup. (3) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan investasi daerah, sehingga dapat memberikan

gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penggunaan metode analisis yang lebih kompleks serta periode penelitian yang lebih panjang juga disarankan agar hasil penelitian menjadi lebih robust. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam fenomena pengangguran terdidik yang ditemukan dalam penelitian ini.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT ..... **i**
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR ..... **ii**
LEMBAR YURIDIS ..... **iii**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **iv**
ABSTRACT ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
RINGKASAN ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**
DAFTARLAMPIRAN ..... **xviii**

1. PENDAHULUAN **2**
2. KAJIAN LITERATUR **13**
2.1 Tinjauan Teori 13
2.1.1 Pembangunan Manusia 13
2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 14
2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka 18
2.1.4 Pekerja Sektor Informal 20
2.1.5 Kemiskinan 23
2.2 Kajian Empiris 25
2.2.1 Pengaruh Kemiskinan Terhadap IPM 25
2.2.2 Pengaruh Pengangguran Terhadap IPM 27
2.2.3 Pengaruh Jumlah Pekerja Informal Terhadap IPM 30
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 31
2.3.1 Kerangka Konseptual 31
2.3.2 Hipotesis Penelitian 31
3. METODE PENELITIAN **31**
3.1 Estimasi Data Panel 33
3.2 Uji Regresi Data Panel 34
3.3 Uji Asumsi Klasik 35
3.4 Analisis Regresi Linear Berganda 36
3.5 Pengujian Hipotesis 36
4. HASIL DAN PEMBAHASAN **37**
4.1 Deskripsi Data Penelitian 37
4.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel 38
4.2.1 Uji Chow (CEM vs FEM) 38
4.2.2 Uji Hausman (FEM vs REM) 38
4.2.3 Penentuan Model Terbaik 39

4.3 Hasil Estimasi Regresi Data Panel 42
4.4 Uji Hipotesis 44
4.4.1 Uji Parsial (Uji t) 44
4.4.2 Uji Simultan (Uji F) dan Koefisien Determinasi (R^2) 45
4.5 Pembahasan Penelitian 46
4.5.1 Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 46
4.5.2 Pengaruh Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 47
4.5.3 Pengaruh Pekerja Sektor Informal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 48
4.5.4 Pengaruh Simultan (Kemiskinan, TPT, dan Sektor Informal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia) 49
5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 50
5.1 Kesimpulan 50
5.2 Rekomendasi 51
5.3 Keterbatasan Penelitian 52

DAFTAR PUSTAKA 53
LAMPIRAN 60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2024 4

Tabel 2. Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (Persen) Tahun 2019-2024 6

Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (Persen) Tahun 2019-2024 8

Tabel 4. Tingkat Partisipasi Pekerja Sektor Informal di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (Persen) Tahun 2019-2024 11

Tabel 5. Hasil Uji Chow 38

Tabel 6. Hasil Uji Hausman 38

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas 39

Tabel 8. Hasil Uji Heterokedastisitas 40

Tabel 9. Hasil Uji Heterokedastisitas Perbaikan 41

Tabel 10. Hasil Estimasi *Fixed Effect Model (FEM)* 42

Tabel 11. Hasil Uji Parsial (Uji t) 44

Tabel 12. Hasil Uji Uji Simultan (Uji F) dan Koefisien Determinasi (R^2) 45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian 31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Data BPS Per Variabel 60
Lampiran 2. Hasil Uji Chow 62
Lampiran 3. Hasil Uji Hausman 62
Lampiran 4. Hasil Uji Multikolinearitas 63
Lampiran 5. Hasil Uji Heterokedastisitas Sebelum Perubahan Model 63
Lampiran 6. Hasil Uji Heterokedastisitas Setelah Perubahan/Perbaikan 64
Lampiran 7. Hasil Uji t 64
Lampiran 8. Hasil Uji Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi (R^2) 65

STUDI KUANTITATIF PENGARUH KEMISKINAN, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, DAN PEKERJA SEKTOR INFORMAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019-2024

[1]Ana Estarti
Universitas Tanjungpura, Indonesia

[2]Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si.
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the effects of poverty, the open unemployment rate (OUR), and workers in the informal sector on the Human Development Index (HDI) in West Kalimantan Province for the period 2019–2024. The research method employs a quantitative approach using panel data from 14 regencies/cities obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The analysis was conducted using panel data regression via the EViews 26 software, with the best model selected using the Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier tests. The results indicate that poverty has a negative and significant effect on the IPM with a coefficient of -1.840240. The open unemployment rate has a positive but insignificant effect on the HDI. Meanwhile, workers in the informal sector have a positive and significant effect on the HDI with a coefficient of 0.088018. Simultaneously, all three variables have a significant effect on the HDI with a coefficient of determination (R^2) of 98.47%. This study is expected to serve as a basis for the government's consideration in improving the quality of human development in West Kalimantan.

Keywords: Human Development Index, Poverty, Open Unemployment Rate, Informal Sector Workers, West Kalimantan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan pekerja sektor informal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat periode 2019–2024. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari 14 kabupaten/kota yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel melalui aplikasi EViews 26 dengan pemilihan model terbaik menggunakan uji Chow, Hausman, dan *Lagrange Multiplier*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM dengan koefisien sebesar -1,840240. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM. Sementara itu, pekerja sektor informal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan koefisien sebesar 0,088018. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 98,47%. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Kalimantan Barat.

Kata Kunci: IPM, Kemiskinan, TPT, Pekerja Sektor Informal, Kalimantan Barat.

[1]anaestarti@student.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kemajuan ekonomi adalah salah satu elemen utama dari pertumbuhan manusia. Proses pertumbuhan ekonomi itu sendiri mencakup sumber daya manusia, yang merupakan komponen produksi seperti tenaga kerja yang mungkin mempengaruhi terjadinya pembangunan ekonomi. Pembangunan struktur dan layanan yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi serta kemajuan berkelanjutan sumber daya manusia, pengetahuan, dan teknologi adalah semua inisiatif penting yang diperlukan untuk mendorong kemajuan ekonomi. Karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menjadikan manusia sebagai salah satu tujuannya, pembangunan ekonomi adalah syarat yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi (Hasibuan et al., 2023).

Tujuan dari pembangunan adalah untuk memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan manusia, yang diukur dengan standar hidup, saat ini digunakan untuk mengevaluasi kemajuan ekonomi. Alih-alih melihat orang sebagai sarana untuk mencapai tujuan, pembangunan manusia melihat mereka sebagai tujuan utama. Meskipun banyak ukuran pembangunan manusia telah dirancang, tidak semuanya cocok digunakan sebagai standar untuk membandingkan negara atau daerah. Akibatnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran luas kemajuan manusia (BPS, 2019).

Sumber daya paling berharga suatu negara adalah rakyatnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan orang untuk hidup panjang, sehat, dan sejahtera. Sebuah filosofi pembangunan yang dikenal sebagai "pembangunan manusia" memandang individu sebagai pusat aktivitas ekonomi. Menguasai sumber daya manusia adalah tujuan utama dari pembangunan untuk menyediakan uang bagi standar hidup yang layak yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan manusia adalah tujuan utama dari semua kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu statistik yang digunakan untuk menilai kemajuan manusia, menurut Arafat dan Rindayati (2018).

Berdasarkan tingkat Asia Tenggara dalam Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dari tahun 2015 hingga revolusi industri 4.0 sejak abad ke-21 hingga masyarakat 5.0, yang muncul sebagai perkembangan dari revolusi industri 4.0, Indonesia telah menghadapi persaingan yang lebih intens dalam kualitas sumber daya manusia. Dibandingkan dengan negara-negara lain, sumber daya manusia Indonesia masih berkualitas rendah. Menurut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Indonesia memiliki skor IPM sebesar 0,718 pada tahun 2019, menempatkannya di peringkat 107 dari 189

negara. Indonesia terus tertinggal di belakang sejumlah negara ASEAN dalam peringkat IPM (UNDP, 2022).

Setiap negara di dunia dibandingkan berdasarkan harapan hidup, literasi, pendidikan, dan kondisi kehidupan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk menilai bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi kualitas hidup penduduk selain mengklasifikasikan suatu negara sebagai negara maju, berkembang, atau paling tidak berkembang. IP, adalah teknik untuk membandingkan secara sistematis dan menyeluruh keadaan pembangunan sosial ekonomi. Pengetahuan, kondisi hidup yang baik, dan hidup yang panjang dan sehat adalah tiga komponen dasar yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (BPS, 2024).

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam. Struktur perekonomian dan ketenagakerjaan di provinsi ini tidak hanya ditopang oleh aktivitas perkotaan, tetapi juga oleh sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, konstruksi, pertambangan, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas pembangunan manusia antardaerah di Kalimantan Barat masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, peningkatan IPM tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kemampuan penduduk memperoleh pendapatan, kesempatan kerja, dan pekerjaan yang mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang memadai. Berikut data BPS (2025) tentang tingkat IPM di Kalimantan Barat tahun 2019-2024:

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sambas	67.02	68.97	69.03	69.88	70.60	71.20
Bengkayang	67.57	67.87	68.04	68.74	69.53	70.30
Landak	65.96	66.10	66.33	67.28	68.22	69.13
Mempawah	65.50	66.71	67.00	67.91	68.91	69.63
Sanggau	65.67	66.73	67.18	67.87	68.73	69.40
Ketapang	67.16	68.13	68.39	68.86	69.61	70.34
Sintang	66.70	67.61	67.66	68.59	69.39	70.13
Kapuas Hulu	65.65	65.92	65.98	66.91	67.86	68.77
Sekadau	64.34	65.33	65.48	66.13	66.83	67.74
Melawi	65.54	65.74	66.06	66.99	67.92	68.81
Kayong Utara	62.66	63.97	64.18	65.09	66.06	67.05
Kubu Raya	67.76	68.89	69.09	69.83	70.50	71.14
Kota Pontianak	79.35	80.10	80.59	81.10	81.63	82.22
Kota Singkawang	71.72	72.73	72.90	73.66	74.13	74.68
Kalimantan Barat	67.65	68.76	68.99	69.71	70.47	71.19

Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2025.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat mencapai 69,41 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 70,13 pada tahun 2024. Namun, angka ini tetap relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata IPM nasional dan provinsi lain di wilayah Kalimantan pada tahun 2024, termasuk Kalimantan Tengah sebesar 72,72, Kalimantan Selatan sebesar 73,03, Kalimantan Timur sebesar 78,83, dan Kalimantan Utara sebesar 73,02. Berdasarkan data BPS terbaru untuk tahun 2024, Kalimantan Barat menduduki peringkat ke-31 dari 38 provinsi di Indonesia dalam hal kinerja IPM. Kondisi ini menyoroti perlunya perhatian lebih besar terhadap upaya pembangunan di provinsi tersebut.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik pembangunan manusia yang beragam antarkabupaten/kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang digunakan dalam penelitian ini, IPM Kalimantan Barat mengalami peningkatan dari 67,65 pada tahun 2019 menjadi 71,19 pada tahun

2024. Meskipun mengalami peningkatan secara konsisten, capaian tersebut masih memperlihatkan adanya kesenjangan pembangunan manusia antarwilayah. Pada tahun 2024, IPM tertinggi terdapat di Kota Pontianak sebesar 82,22, sedangkan IPM terendah terdapat di Kabupaten Kayong Utara sebesar 67,05. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan manusia di tingkat provinsi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang seragam di seluruh kabupaten atau kota. Perbedaan capaian IPM tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi masing-masing wilayah. Kabupaten/kota yang memiliki IPM relatif tinggi tidak selalu memiliki karakteristik kemiskinan, pengangguran, dan pekerjaan informal yang sama dengan wilayah lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, diperlukan analisis mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan perubahan IPM, khususnya faktor yang mencerminkan kemampuan ekonomi dan kondisi pasar tenaga kerja masyarakat.

Salah satu persoalan ekonomi yang berkaitan erat dengan pembangunan manusia adalah kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya menggambarkan rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat mencerminkan keterbatasan akses terhadap berbagai kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan hidup. Rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam mengalokasikan sumber daya untuk investasi sumber daya manusia. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menghambat peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merupakan komponen utama pembentuk IPM. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya hambatan terhadap peningkatan pembangunan manusia.

Kemiskinan suatu daerah harus ditangani karena dapat menghambat pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik. Menurut Abdoellah (2016), kemiskinan adalah masalah yang kompleks yang ditandai oleh sejumlah isu, termasuk standar kesehatan yang rendah, akses yang tidak memadai terhadap air minum bersih, kualitas hidup yang rendah bagi masyarakat, pendidikan, dan gizi anak. Provinsi Kalimantan Barat memiliki tingkat kemiskinan terendah di Indonesia, berada di urutan kesebelas. Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional di Indonesia per September 2024 tercatat sebesar 8,57%. Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Papua Pegunungan, sementara Bali mencatatkan tingkat kemiskinan terendah. Sebagai perbandingan, Kalimantan Barat menduduki peringkat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah ke-11 secara nasional. Pada tahun 2024, jumlah

orang yang hidup dalam kemiskinan di Kalimantan Barat tercatat sebanyak 333,99 ribu, mencerminkan penurunan dari 370,47 ribu pada tahun 2019 (BPS, 2025).

Tabel 2. Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (Persen) Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sambas	8.19	7.70	7.66	6.92	7.08	6.53
Bengkayang	6.96	6.62	6.48	6.03	6.28	6.00
Landak	11.47	11.12	10.99	10.01	9.97	8.98
Mempawah	5.32	4.95	5.18	5.32	5.21	4.83
Sanggau	4.57	4.46	4.55	4.51	4.79	4.67
Ketapang	10.54	10.29	10.13	9.39	9.25	8.50
Sintang	9.65	9.27	9.28	8.57	8.18	8.03
Kapuas Hulu	9.62	8.99	8.93	8.59	8.16	7.40
Sekadau	6.11	5.87	6.26	5.85	5.90	5.66
Melawi	12.38	12.04	12.01	11.44	11.12	10.62
Kayong Utara	9.98	9.56	9.33	9.04	9.13	8.84
Kubu Raya	4.74	4.42	4.34	4.12	4.23	4.08
Kota Pontianak	4.88	4.70	4.58	4.46	4.45	4.20
Kota Singkawang	4.91	4.53	4.83	4.67	4.70	4.53
Kalimantan Barat	7.49	7.17	7.15	6.73	6.71	6.32

Sumber: BPS Kaliamntan Barat, 2025.

Fenomena kemiskinan di Kalimantan Barat selama periode penelitian menunjukkan kecenderungan membaik pada tingkat provinsi, tetapi masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antarkabupaten/kota. Persentase penduduk miskin Kalimantan Barat menurun dari 7,49 persen pada tahun 2019 menjadi 6,32 persen pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2024 terdapat perbedaan yang cukup mencolok antarwilayah. Kabupaten Melawi memiliki tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 10,62 persen, diikuti Kabupaten Landak sebesar 8,98 persen, sedangkan Kabupaten Kubu Raya memiliki tingkat kemiskinan sebesar 4,08 persen dan Kota Pontianak sebesar 4,20 persen.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan pada tingkat provinsi belum sepenuhnya diikuti oleh kondisi yang sama pada seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Melawi, misalnya, memiliki tingkat kemiskinan 12,38 persen pada tahun 2019 dan masih mencapai 10,62 persen pada tahun 2024. Pada periode yang sama, IPM Kabupaten Melawi meningkat dari 65,54 menjadi 68,81. Sementara itu, Kota Pontianak memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih rendah, yaitu 4,20 persen pada tahun 2024, dengan IPM mencapai 82,22. Perbedaan tersebut menggambarkan adanya keterkaitan antara kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan capaian pembangunan manusia, meskipun hubungan tersebut perlu dibuktikan secara empiris melalui analisis statistik.

Kemiskinan memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan manusia karena keterbatasan pendapatan dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam konteks pendidikan, rumah tangga miskin menghadapi keterbatasan untuk membiayai pendidikan, baik berupa biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Dalam konteks kesehatan, keterbatasan ekonomi dapat mengurangi kemampuan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan gizi. Sementara itu, dalam dimensi standar hidup layak, rendahnya pendapatan secara langsung membatasi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, secara teoritis kemiskinan diperkirakan memiliki pengaruh negatif terhadap IPM. Semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin besar hambatan terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Bank Dunia (2019) menyatakan bahwa tidak memiliki cukup uang atau sumber daya untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kesehatan dan pendidikan yang memadai adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan. Di Indonesia, masalah kemiskinan yang terus-menerus menarik perhatian khusus. Di Indonesia, kemiskinan telah lama menjadi masalah yang sering dibahas (Yulianto, 2023).

Selain kemiskinan, kondisi pasar tenaga kerja juga menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas hidup masyarakat. Salah satu indikator utama pasar tenaga kerja adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dan menggambarkan proporsi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Tingginya tingkat pengangguran menunjukkan bahwa sebagian penduduk yang telah masuk ke dalam pasar kerja belum memperoleh kesempatan untuk menggunakan kemampuan produktifnya dan mendapatkan pendapatan dari pekerjaan.

Mempromosikan kekayaan dan kesejahteraan bagi masyarakat adalah tujuan utama dari pembangunan; namun, pengangguran menyebabkan tingkat kemakmuran

kolektif yang kurang ideal. Mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah akan lebih menantang jika tingkat pengangguran tinggi. Penyediaan kesehatan dan pendidikan, dua komponen penting untuk meningkatkan kualitas manusia, menjadi lebih menantang ketika pendapatan dan daya beli masyarakat menurun (Permatasari et al., 2024).

Permasalahan pengangguran memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang lebih luas. Individu yang tidak memperoleh pekerjaan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan, sedangkan rumah tangga yang memiliki anggota menganggur dapat mengalami penurunan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat kemampuan rumah tangga membiayai pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan risiko masuk atau kembali ke dalam kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan pengangguran berpotensi memberikan tekanan terhadap kualitas pembangunan manusia.

Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (Persen) Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sambas	3.48	3.71	3.97	5.08	5.04	4.99
Bengkayang	2.66	3.91	4.42	2.84	2.92	2.81
Landak	2.69	3.38	3.22	1.78	2.24	2.22
Mempawah	5.11	7.55	7.71	7.48	7.33	6.78
Sanggau	3.00	3.52	3.45	3.76	3.86	3.71
Ketapang	4.39	7.30	6.94	6.71	6.57	6.36
Sintang	3.10	4.50	3.95	2.97	2.92	2.85
Kapuas Hulu	2.43	4.02	4.18	2.21	2.19	2.18
Sekadau	3.04	3.39	2.92	1.33	2.29	2.24
Melawi	2.39	2.70	2.66	1.95	2.46	2.41
Kayong Utara	3.89	3.71	3.78	3.10	3.04	3.02
Kubu Raya	5.50	7.14	7.02	6.87	6.76	6.73
Kota Pontianak	9.06	12.36	12.38	9.92	8.92	8.29
Kota Singkawang	6.31	8.78	9.16	8.63	8.51	7.92
Kalimantan Barat	4.35	5.81	5.82	5.11	5.05	4.86

Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2025.

Kondisi ketenagakerjaan Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pengangguran masih menjadi persoalan meskipun mengalami perubahan dari waktu ke waktu. TPT Kalimantan Barat meningkat dari 4,35 persen pada tahun 2019 menjadi 5,81 persen pada tahun 2020, kemudian mencapai 5,82 persen pada tahun 2021. Setelah itu, TPT mengalami penurunan menjadi 5,11 persen pada 2022, 5,05 persen pada 2023, dan 4,86 persen pada 2024. Perubahan tersebut menunjukkan adanya dinamika pasar tenaga kerja selama periode penelitian, terutama pada periode yang bertepatan dengan terjadinya pandemi COVID-19 dan masa pemulihan ekonomi.

Variasi TPT juga terlihat jelas antarwilayah. Pada tahun 2024, Kota Pontianak memiliki TPT sebesar 8,29 persen, sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 2,18 persen. Kota Singkawang juga memiliki TPT yang relatif tinggi, yaitu 7,92 persen, sementara Kabupaten Landak sebesar 2,22 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Kalimantan Barat memiliki karakteristik yang berbeda antarwilayah. Wilayah perkotaan dengan struktur ekonomi yang lebih kompleks dapat menghadapi pengangguran yang lebih tinggi karena proses pencarian pekerjaan, tuntutan kualifikasi, serta ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.

Menariknya, pola antara TPT dan IPM tidak selalu menunjukkan hubungan negatif secara sederhana. Kota Pontianak, misalnya, memiliki IPM tertinggi di Kalimantan Barat, yaitu 82,22 pada tahun 2024, tetapi sekaligus memiliki TPT tertinggi sebesar 8,29 persen. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingginya IPM suatu wilayah tidak secara otomatis diikuti oleh rendahnya TPT. Salah satu kemungkinan penjelasannya adalah adanya fenomena pengangguran terdidik, yaitu pengangguran yang terjadi pada penduduk dengan tingkat pendidikan relatif tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pengangguran dan pembangunan manusia perlu dianalisis secara empiris dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah. Temuan penelitian dalam file juga menunjukkan bahwa TPT memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM.

Secara teoritis, TPT diperkirakan memiliki pengaruh negatif terhadap IPM. Peningkatan pengangguran dapat mengurangi pendapatan individu dan rumah tangga, menurunkan daya beli, serta membatasi kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperbesar kemampuan rumah tangga melakukan investasi pada modal manusia. Dengan demikian, tingkat pengangguran yang rendah secara konseptual dapat mendukung peningkatan pembangunan manusia.

Di samping kemiskinan dan pengangguran, karakteristik pekerjaan yang dimiliki masyarakat juga merupakan aspek penting dalam menjelaskan pembangunan manusia. Salah satu karakteristik tersebut adalah keberadaan pekerja sektor informal. Sektor informal memiliki peranan penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal. Pekerjaan informal dapat ditemukan pada berbagai aktivitas ekonomi, seperti perdagangan skala kecil, usaha rumah tangga, pekerja keluarga, pekerja mandiri, jasa, pertanian, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Keberadaan sektor informal pada satu sisi berfungsi sebagai mekanisme penyerapan tenaga kerja, tetapi pada sisi lain sering dikaitkan dengan karakteristik pekerjaan yang relatif rentan, seperti pendapatan yang tidak tetap, keterbatasan perlindungan sosial, dan rendahnya kepastian kerja.

Di negara-negara berkembang, kegiatan informal memainkan peran penting dalam bidang sosial politik dan ekonomi. Banyak penduduk setempat beralih ke pekerjaan informal karena kurangnya pilihan pekerjaan yang sah (BPS, 2022). Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah adalah alasan banyaknya pekerja di sektor informal (Yuniati, 2019).

Dalam konteks pembangunan manusia, besarnya proporsi pekerja sektor informal menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti karena pengaruhnya terhadap IPM tidak selalu bersifat sederhana. Pekerjaan informal dapat memberikan sumber pendapatan bagi penduduk yang tidak terserap dalam pekerjaan formal sehingga keberadaannya dapat membantu rumah tangga mempertahankan konsumsi dan mengurangi risiko pengangguran. Namun, apabila pekerjaan informal didominasi oleh pekerjaan dengan produktivitas dan pendapatan rendah, maka peningkatan proporsi pekerja informal belum tentu diikuti oleh peningkatan standar hidup yang signifikan. Oleh sebab itu, sektor informal dapat berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja sekaligus mencerminkan keterbatasan kualitas kesempatan kerja.

Keberadaan pekerja sektor informal menjadi penting untuk dikaji karena kualitas pekerjaan merupakan salah satu aspek yang menentukan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup. Pekerjaan dengan pendapatan rendah dan tidak stabil dapat membatasi kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sebaliknya, aktivitas informal yang produktif dan memberikan pendapatan relatif memadai dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena itu, arah pengaruh pekerja sektor informal terhadap IPM perlu dibuktikan secara empiris dan tidak hanya didasarkan pada asumsi teoritis. Dalam penelitian ini, proporsi

pekerja sektor informal ditempatkan sebagai salah satu variabel yang diduga memiliki hubungan dengan perubahan IPM di Kalimantan Barat.

Tabel 4. Tingkat Partisipasi Pekerja Sektor Informal di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (Persen) Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sambas	71.76	74.28	72.84	74.12	72.72	72.78
Bengkayang	73.47	75.81	70.16	69.95	72.93	72.48
Landak	68.74	71.78	70.19	72.29	71.13	71.83
Mempawah	63.12	64.14	60.86	63.31	68.27	73.07
Sanggau	69.18	70.38	69.41	70.27	70.31	71.69
Ketapang	65.53	60.75	64.44	60.57	66.48	66.73
Sintang	72.01	75.57	77.78	73.14	74.12	74.96
Kapuas Hulu	77.22	74.09	72.35	77.68	72.28	76.02
Sekadau	77.38	77.53	71.98	74.31	73.77	76.65
Melawi	74.57	73.93	72.31	74.41	73.73	75.07
Kayong Utara	66.43	65.53	65.53	70.02	72.54	71.70
Kubu Raya	64.86	67.71	67.47	64.66	65.28	65.83
Kota Pontianak	61.75	60.05	61.94	64.82	63.47	64.53
Kota Singkawang	67.04	63.84	64.31	68.86	66.60	66.12
Kalimantan Barat	68.51	68.83	68.45	68.97	69.42	70.44

Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2025.

Data Kalimantan Barat menunjukkan bahwa proporsi pekerja sektor informal justru mengalami peningkatan pada akhir periode penelitian. Tingkat pekerja sektor informal di Kalimantan Barat tercatat sebesar 68,51 persen pada tahun 2019, menurun menjadi 68,45 persen pada 2021, kemudian meningkat menjadi 68,97 persen pada 2022, 69,42 persen pada 2023, dan mencapai 70,44 persen pada tahun 2024. Dengan demikian, pada tahun 2024 sekitar tujuh dari setiap sepuluh pekerja di

Kalimantan Barat berada dalam kategori pekerjaan informal berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian.

Fenomena tersebut juga menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antarwilayah. Pada tahun 2024, proporsi pekerja sektor informal mencapai 76,65 persen di Kabupaten Sekadau, 76,02 persen di Kabupaten Kapuas Hulu, 75,07 persen di Kabupaten Melawi, dan 74,96 persen di Kabupaten Sintang. Sebaliknya, Kota Pontianak memiliki proporsi pekerja sektor informal sebesar 64,53 persen dan Kota Singkawang sebesar 66,12 persen. Perbedaan tersebut mencerminkan karakteristik struktur ekonomi dan pasar tenaga kerja yang berbeda antara wilayah perkotaan dan kabupaten yang memiliki aktivitas ekonomi berbasis pertanian, perdagangan kecil, jasa, serta usaha berskala rumah tangga.

Apabila ketiga variabel tersebut dibandingkan dengan perkembangan IPM, terlihat adanya fenomena yang menarik. Kabupaten Melawi memiliki proporsi pekerja informal sebesar 75,07 persen dan tingkat kemiskinan 10,62 persen pada tahun 2024, dengan IPM sebesar 68,81. Sebaliknya, Kota Pontianak memiliki proporsi pekerja informal yang lebih rendah, yaitu 64,53 persen, tingkat kemiskinan 4,20 persen, dan IPM sebesar 82,22. Pada sisi lain, Kota Pontianak memiliki TPT sebesar 8,29 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Melawi sebesar 2,41 persen. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara pembangunan manusia dengan kemiskinan, pengangguran, dan pekerjaan informal tidak bersifat sederhana dan seragam pada setiap kabupaten/kota.

Kondisi tersebut menjadi semakin relevan karena periode 2019–2024 mencakup fase sebelum pandemi COVID-19, periode pandemi, serta masa pemulihan ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi selama periode tersebut dapat memengaruhi kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, tingkat kemiskinan, serta perubahan struktur pekerjaan. Data dalam penelitian menunjukkan bahwa TPT meningkat secara tajam pada 2020–2021 sebelum kembali menurun, sedangkan proporsi pekerja informal cenderung meningkat pada akhir periode penelitian. Pada saat yang sama, IPM Kalimantan Barat tetap mengalami peningkatan dari 67,65 pada 2019 menjadi 71,19 pada 2024. Pergerakan berbagai indikator tersebut menunjukkan adanya dinamika pembangunan manusia yang perlu dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan secara simultan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait hubungan antara jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan jumlah pekerja sektor informal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat periode 2019–2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen, yaitu kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan

pekerja sektor informal, terhadap variabel dependen berupa IPM, baik secara parsial maupun simultan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi yang memengaruhi kualitas pembangunan manusia di Kalimantan Barat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat.